

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pengalaman pembangunan di beberapa negara di dunia ketiga yang berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata tidak mampu meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi keberhasilan pembangunan yang ada selama ini. Tolak ukur GNP (*Gross National Product*) sebagai indikator keberhasilan kinerja pembangunan dan kemakmuran menjadi diragukan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur oleh tingkat pertumbuhan GNP tetapi harus mencakup pengangguran, kemiskinan, pemerataan distribusi hasil pembangunan, penyerapan tenaga kerja dan kelestarian sumberdaya alam untuk generasi mendatang (Al Mahmubah, 2008).

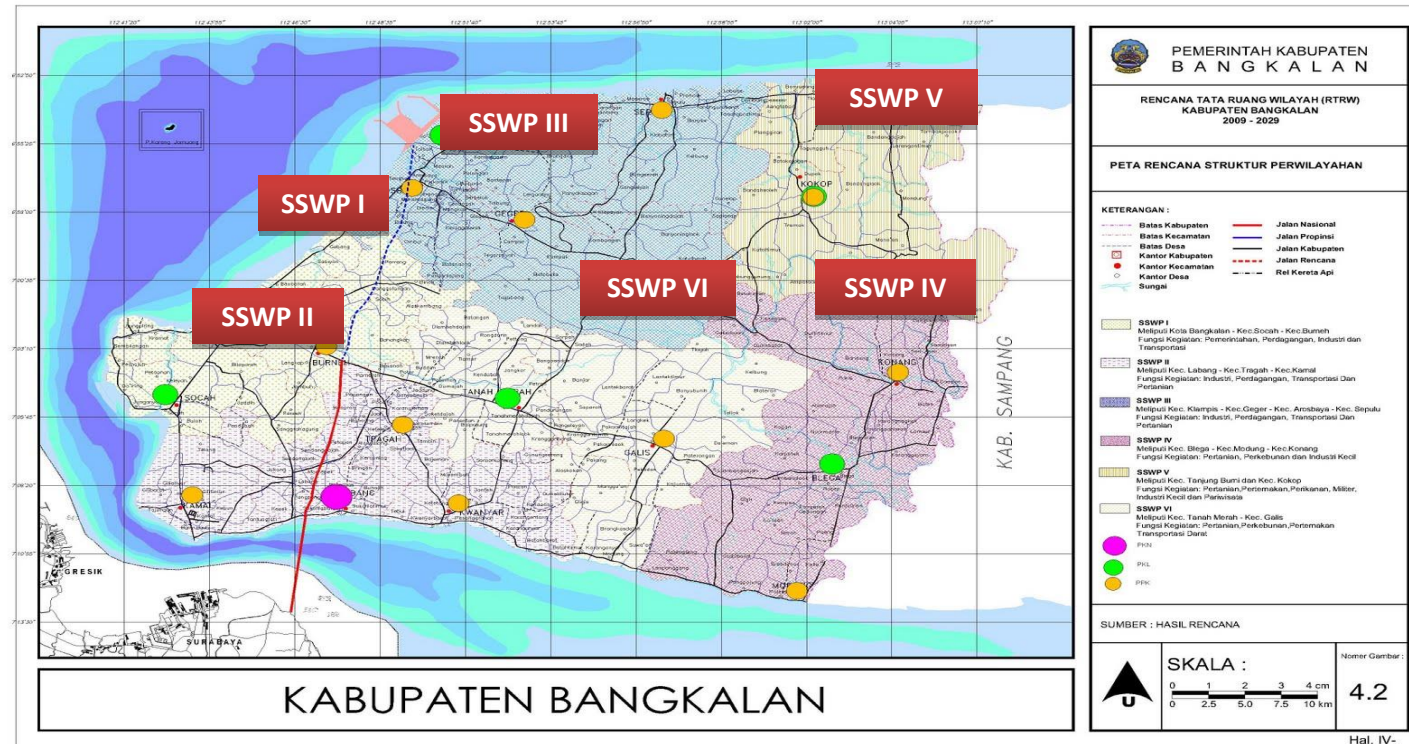
Pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999) adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya

harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta: Petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

Salah satu kebijakan perencanaan pembangunan yang diambil pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menciptakan perekonomian daerah yaitu dengan penerapan kebijakan pembangunan daerah melalui pewilayahan pembangunan, tetapi kesenjangan antardaerah diharapkan dapat dipersempit. Kabupaten Bangkalan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029 menetapkan daerah – daerah yang telah dikelompokkan dalam satuan wilayah pembangunan.

Gambar 1.1

Struktur Ruang Wilayah



Sumber: Bappeda Kabupaten Bangkalan, 2009

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029, yang ditetapkan sebagai Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) sebagai berikut:

1. SSWP I

Meliputi Kecamatan Bangkalan - Kec. Socah - Kec. Burneh.

Fungsi Kegiatan: Pemerintahan, Perdagangan, Industri dan Transportasi.

2. SSWP II

Meliputi Kecamatan Labang - Kec. Tragah - Kec. Kamal.

Fungsi Kegiatan: Industri, Perdagangan, Transportasi dan Pertanian

3. SSWP III

Meliputi Kecamatan Klampis - Kec. Geger - Kec. Arosbaya - Kec. Sepuluh.

Fungsi Kegiatan: Industri, Perdagangan, Transportasi dan Pertanian.

4. SSWP IV

Meliputi Kecamatan Blega - Kec. Modung - Kec. Konang.

Fungsi Kegiatan: Pertanian, Perkebunan dan Industri Kecil.

5. SSWP V

Meliputi Kecamatan Tanjung Bumi - Kec. Kokop.

Fungsi Kegiatan: Industri Kecil dan Pariwisata.

6. SSWP VI

Meliputi Kecamatan Tanah Merah - Kec. Galis.

Fungsi Kegiatan: Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Transportasi Darat.

SSWP wilayah yang digunakan dalam penelitian ini ialah SSWP III dan V. Berdasarkan SSWP yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangkalan, pembagian tersebut telah berdasarkan dengan potensi lokal yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi dengan kata lain, pemerintah Kabupaten Bangkalan

ingin memanfaatkan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing kecamatan untuk dikembangkan di daerah masing-masing. Sehingga setiap kecamatan di Kabupaten Bangkalan tidak terdapat ketimpangan. Hal ini juga sejalan dengan Skala Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan. Skala Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bangkalan meliputi:

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
2. Peningkatan Akses Kualitas Pendidikan & Kesehatan
3. Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pedesaan
4. Pengelolaan Potensi Daerah & Peningkatan Investasi
5. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan
6. Peningkatan Upaya Anti Korupsi & Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Namun dalam pelaksanaannya, upaya pemerintah dalam pembangunan melalui perwilayahan pembangunan ini belum berhasil. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan Jembatan Suramadu di wilayah Bangkalan bagian utara. Sedangkan di daerah selatan belum terdapat pembangunan masih dalam proses perencanaan. Selain itu ketimpangan antara wilayah jalur utara dan jalur selatan masih terjadi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangkalan berdasarkan analisis shift share tahun 1993-1998 dan tahun 2002-2005.

Berdasarkan data pengkategorian pertumbuhan perekonomian hasil analisis shift share (ASS) tahun 1993-1998 dan tahun 2002-2005 di kecamatan-kecamatan Kabupaten Bangkalan dapat terlihat bahwa masih terdapat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 1993-1998 terdapat 7 kecamatan yang dapat dikategorikan sebagai daerah maju, yaitu Kamal, Socah, Bangkalan, Burneh, Tanjung Bumi, Sepulu, dan Klampis. Sedangkan sisanya yakni sebanyak 11 kecamatan yaitu Labang, Kwanyar, Modung, Blega, Konang, Galis, Tanah Merah, Tragah, Arosbaya, Geger, dan Kokop masih tergolong sebagai daerah yang lamban. Pada tahun 2002-2005 peningkatan daerah yang dikategorikan sebagai daerah maju mengalami peningkatan. Terdapat 9 kecamatan yaitu Kamal, Labang, Modung, Blega, Socah, Bangkalan, Burneh, Tanjung Bumi dan Arosbaya yang dikategorikan sebagai daerah maju. Sedangkan sisanya yaitu Kwanyar, Konang, Galis, Tanah Merah, Tragah, Geger, Kokop, Sepuluh, dan Klampis masih tergolong sebagai daerah lamban. Namun dari data tersebut perlu dicermati bahwa terdapat 2 daerah yang mengalami kemunduran, yaitu kecamatan Sepuluh dan Klampis. Pada penelitian (Indahsari, 2001) kedua daerah tersebut tergolong sebagai daerah maju, sedangkan tahun 2002-2005 (Indahsari, 2007) kedua daerah tersebut malah tergolong sebagai daerah lamban (Lampiran 1).

Data persentase kemiskinan tahun 2012 juga menunjukkan masih terdapat ketimpangan di antara kecamatan Kabupaten Bangkalan. Persentase kemiskinan yang rendah terdapat pada Kecamatan Kamal, Labang, Socah, Bangkalan, Burneh, Arosbaya dan Tanjung Bumi yang persentasenya di bawah 55%. Sedangkan kecamatan sisanya masih memiliki persentase kemiskinan yang tinggi yaitu diatas 55%, hal ini terlihat pada lampiran 2.

Salah satu pembangunan yang berdampak besar terhadap perekonomian Kabupaten Bangkalan ialah pembangunan Jembatan Suramadu oleh Pemerintah Indonesia. Dengan adanya pembangunan Jembatan Suramadu telah meningkatkan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kabupten Bangkalan. Hal ini terlihat dari banyaknya UKM-UKM di sepanjang jalan kaki jembatan Suramadu. Selain di sepanjang jalan kaki jembatan Suramadu, UKM-UKM dan restoran juga banyak berdiri di daerah kecamatan Burneh yang merupakan daerah menuju Ibu Kota Kabupaten, yaitu banyak berdirinya restoran kuliner. Selain itu juga merambat terhadap daerah jalur ke timur menuju Kabupaten Sampang. Banyak UKM-UKM berdiri di daerah Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Galis dan Kecamatan Blega. Berkembangnya daerah tersebut dikarenakan merupakan pusat jalan raya menuju Kabupaten Sampang bila dibandingkan dengan daerah jalur utara yang jauh dari Jembatan Suramadu.

Jalur jalan raya pusat yang kedua ialah daerah kamal hingga Kecamatan Bangkalan. Daerah tersebut juga berkembang pesat, hal ini dikarenakan merupakan jalur menuju ibu Kota Kabupaten. Alasan kedua berkembangnya daerah ini ialah adanya pelabuhan Kamal yang hingga saat ini masih beroperasi pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Alasan ketiga ialah adanya Universitas Negeri di daerah desa Telang Kecamatan Kamal. Dengan adanya Universitas Negaeri tersebut mendorong perekonomian masyarakat dengan cara meningkatnya jumlah penduduk (mahasiswa). Sehingga setiap tahunnya membutuhkan bangunan (kos-kosan), hal tersebut dapat dijadikan lahan bisnis yang membuat daerah tersebut terus berkembang dari tahun ke tahunnya.

Jalur Ketiga ialah wilayah Bangkalan bagian utara, wilayah tersebut merupakan wilayah yang paling lambat berkembangnya. Hal ini di karenakan

tidak adanya bangunan penunjang yang dapat menunjang daerah jalur wilayah Bangkalan Utara. Wilayah Bangkalan Utara yang dimaksudkan ialah Kecamatan Arosbaya, Kec. Klampis, Kec. Sepuluh, Kec. Kokop, Kec. Geger dan Kecamatan Tanjung Bumi. Berdasarkan paparan diatas perlunya adanya pengembangan di daerah wilayah Bangkalan Utara guna meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

Alasan ketimpangan antar daerah yakni Kecamatan Arosbaya, Kec. Klampis, Kec. Sepuluh, Kec. Kokop, Kec. Geger dan Kecamatan Tanjung Bumi sebagian besar masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi. Alasan kedua ialah jalur yang membelah Kabupaten Bangkalan dalam 2 jalur utama yaitu jalur selatan dan jalur utara. Jalur selatan pertumbuhan ekonominya lebih meningkat bila dibandingkan dengan jalur utara. Hal ini karena ditunjang oleh pembangunan jembatan Suramadu, Kampus UTM dan Kecamatan Bangkalan sebagai Ibukota Kabupaten di jalur selatan. Sedangkan jalur utara hingga saat ini belum terdapat pembangunan guna menunjang perekonomian di daerah jalur utara. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti daerah-daerah di wilayah Bangkalan bagian utara, yaitu di Kecamatan Arosbaya, Kec. Klampis, Kec. Sepuluh, Kec. Kokop, Kec. Geger dan Kecamatan Tanjung Bumi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka judul dalam penelitian ini ialah “ **Kajian Pengembangan Wilayah Bangkalan Bagian Utara dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangkalan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, perlu adanya pengembangan di daerah Bangkalan bagian utara. Pengembangan daerah dapat dilakukan dengan menentukan pusat pertumbuhan dan potensi ekonomi wilayah. Sehingga nantinya pengembangan daerah yang telah dilakukan tidak hanya memberikan manfaat untuk satu daerah yaitu daerah pusat pertumbuhan, tetapi juga dapat bermanfaat terhadap daerah sekitarnya.

Penentuan orde perkotaan dapat didasarkan atas gabungan beberapa variabel. Variabel yang umum dianggap berpengaruh dalam menetapkan orde perkotaan (Tarigan, 2005) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk perkotaan.
2. Banyaknya fasilitas yang dimiliki.
3. Tingkat aksesibilitas dari kota tersebut terhadap kota terdekat yang memiliki orde lebih tinggi di wilayah itu (misalnya, ibukota kabupaten/ibukota propinsi).

Berdasarkan teori diatas, penentuan pusat pertumbuhan dapat dilakukan dengan menggabungkan interaksi yang kuat dengan daerah sekitarnya dan jumlah fasilitas umum yang tersedia. Berdasarkan paparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Daerah mana yang berpotensi dijadikan sebagai pusat pertumbuhan produksi berdasarkan interaksi ekonomi antar wilayah dan ketersediaan fasilitas umum di wilayah Bangkalan bagian utara?
2. Sektor-sektor potensial apa saja yang dapat dikembangkan di daerah Bangkalan bagian utara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis daerah yang berpotensi dijadikan sebagai pusat pertumbuhan produksi berdasarkan interaksi ekonomi antar wilayah dan ketersediaan fasilitas umum di wilayah Bangkalan bagian utara.
2. Menganalisis sektor-sektor potensial apa saja yang dapat dikembangkan di daerah Bangkalan bagian utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang ingin dicapai ialah:

1. Dapat dijadikan studi keilmuan tentang perencanaan daerah yang mengandalkan potensi lokal daerah.
2. Dapat memberikan manfaat teoritis akan pentingnya perencanaan daerah dalam meningkatkan perekonomian wilayah.

Sedangkan manfaat praktis yang ingin dicapai ialah:

1. Sebagai sumber informasi kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan serta pihak–pihak terkait dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi regional yang berkelanjutan sehingga pemerintah dapat lebih akomodatif dalam pembangunan daerah.
2. Sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan kinerja masing–masing sektor.